

TESIS

**PENGARUH BESARAN ANGGARAN, BESARAN ORGANISASI DAN
KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP DAYA SERAP ANGGARAN
DI KABUPATEN-KABUPATEN SE-PROVINSI SULAWESI BARAT**

***THE EFFECT OF BUDGET AMOUNT, ORGANIZATIONAL SCALE AND
FISCAL DEPENDABILITY ON BUDGET ABSORPTION IN THE
DISTRICTS OF WEST SULAWESI PROVINCE***

ERICK FRITHS GRENIUS

A042192033



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH BESARAN ANGGARAN, BESARAN ORGANISASI DAN
KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP DAYA SERAP ANGGARAN
DI KABUPATEN-KABUPATEN SE-PROVINSI SULAWESI BARAT**

***THE EFFECT OF BUDGET AMOUNT, ORGANIZATIONAL SCALE AND
FISCAL DEPENDABILITY ON BUDGET ABSORPTION IN THE
DISTRICTS OF WEST SULAWESI PROVINCE***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

ERICK FRITHS GRENIUS

A042192033



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH BESARAN ANGGARAN, BESARAN ORGANISASI DAN
KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP DAYA SERAP ANGGARAN
DI KABUPATEN-KABUPATEN SE-PROVINSI SULAWESI BARAT**

***THE EFFECT OF BUDGET AMOUNT, ORGANIZATIONAL SCALE AND
FISCAL DEPENDABILITY ON BUDGET ABSORPTION IN THE
DISTRICTS OF WEST SULAWESI PROVINCE***

disusun dan diajukan oleh

**ERICK FRITHS GRENIUS
A042192033**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 03 Juni 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

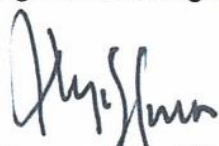


Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP. 196302101990021001



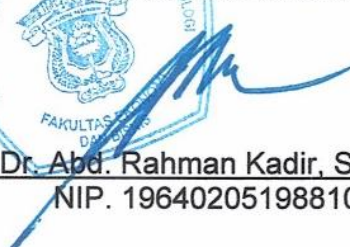
Dr. Muhammad Toaha, SE., M.Si
NIP. 196012311986011008

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196406091992031003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ERICK FRITHS GRENIUS**

NIM : **A042192033**

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

PENGARUH BESARAN ANGGARAN, BESARAN ORGANISASI DAN KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP DAYA SERAP ANGGARAN DI KABUPATEN-KABUPATEN SE-PROVINSI SULAWESI BARAT

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juni 2022

Yang menyatakan,



Erick Friths Grenius

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.,CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA dan Bapak Dr. Muhammad Toaha, SE.,M.Si sebagai tim penasihat, Ibu Dr. Fatmawati, SE.,M.Si, Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Prof. Dr. Abdul Razak Munir, SE.,M.Si.,M.Mktg atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. Terima kasih kepada ayah, saudara-saudara, teman-teman peneliti, serta pihak akademik atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat

kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Dosen dan Pegawai Program Studi Magister Keuangan Daerah yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Keuangan Daerah.
7. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Juni 2022

Peneliti

ABSTRAK

ERICK FRITHS GRENIUS. *Pengaruh Besaran Anggaran, Besaran Organisasi, dan Ketergantungan Fiskal terhadap Daya Serap Anggaran di Kabupaten-kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat* (dibimbing oleh Syarifuddin dan Muhammad Toaha).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh besaran anggaran, besaran organisasi, dan ketergantungan fiskal terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) besaran anggaran berpengaruh positif terhadap daya serap anggaran di kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat; (2) besaran organisasi tidak berpengaruh terhadap daya serap anggaran di kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat; dan (3) ketergantungan fiskal berpengaruh negatif terhadap daya serap anggaran di kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: besaran anggaran, besaran organisasi, ketergantungan fiskal, daya serap anggaran



ABSTRACT

ERICK FRITHS GRENIUS. *The Effect of Budget Amount, Organizational Scale and Fiscal Dependency on Budget Absorption in The Regencies of West Sulawesi Province* (Supervised by **Syarifuddin** and **Muhammad Toaha**)

This study aims to determine the effect of budget size, organizational size, and fiscal dependence on budget absorption in the Regencies of West Sulawesi Province.

This study used research methods with descriptive analysis in a quantitative approach.

The results of this study are 1) Budget Amount has a positive effect on budget absorption in the Regencies of West Sulawesi Province; 2) Organizational Scale has no effects on budget absorption in the Regencies of West Sulawesi Province; and 3) Fiscal Dependency has a negative effect on budget absorption in the Regencies of West Sulawesi Province.

Keywords: Budget Amount, Organizational Scale, Fiscal Dependency, Budget Absorption



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Penelitian	6
1.4.2 Kegunaan praktik.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	8
2.1.1 Manajemen Keuangan	8
2.1.2 Besaran Anggaran	15
2.1.3 Besaran Organisasi.....	19
2.1.4 Ketergantungan Fiskal	21
2.1.5 Daya Seap Anggaran.....	25
2.2 Tinjauan Empiris	28

BAB III : KERANGKA DAN HIPOTESIS.....	42
3.1 Kerangka Konseptual.....	42
3.1.1 Hubungan Besaran Anggaran terhadap Daya Serap Anggaran	42
3.1.2 Hubungan Besaran Organisasi terhadap Daya Serap Anggaran	43
3.1.3 Hubungan Ketergantungan Fiskal terhadap Daya Serap Anggaran	44
3.2 Hipotesis	45
 BAB IV METODE PENELITIAN.....	 47
4.1 Rancangan Penelitian.....	47
4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	47
4.3 Populasi dan Sampel.....	48
4.3.1 Populasi	48
4.3.2 Sampel.....	48
4.4 Jenis dan Sumber Data	49
4.4.1 Jenis Data	49
4.4.2 Sumber Data.....	50
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	50
4.6 Devinisi Variabel	51
4.7 Metode Analisis dan Pengujian Analisis.....	53
4.7.1 Teknik Analisis	53
4.7.2 Uji Asumsi Klasik	54
4.7.3 Analisis Regresi	55
4.7.4 Pengujian Hipotesis	57
 BAB V HASIL PENELITIAN	 60
5.1 Deskripsi Data.....	60
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	61

5.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	61
5.2.2 Uji Regresi.....	63
5.2.3 Uji Hipotesis	67
BAB VI PEMBAHASAN.....	70
6.1 Hubungan Besaran Anggaran terhadap Daya Serap Anggaran....	70
6.2 Hubungan Besaran Organisasi terhadap Daya Serap Anggaran.....	72
6.3 Hubungan Ketergantungan Fiskal terhadap Daya Serap Anggaran.....	75
BAB VII PENUTUP	78
7.1 Kesimpulan	78
7.2 Implikasi	78
7.2.1 Implikasi Teoritik.....	79
7.2.2 Kegunaan Praktik.....	80
7.3 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Kinerja Realisasi Keuangan APBD 2016-2019 Provinsi Sulawesi Barat (%).....	3
2.1 Matriks Penelitian Sebelumnya.....	37
4.1 Kriteria Koefisien Korelasi.....	55
5.1 Deskripsi Data Penelitian.....	59
5.2 Hasil Uji Normalitas.....	60
5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
5.4 Hasil Uji Autokorelasi	61
5.5 Hasil Uji Multikolinearitas	62
5.6 Hasil Uji Regresi Berganda.....	62
5.7 Kriteria Keputusan Koefisien Korelasi	64
5.8 Hasil Uji Korelasi	64
5.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	65
5.10 Hasil Uji t (Parsial).....	66
5.11 Hasil Uji F (Simultan)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran merupakan motor penggerak yang digunakan sebagai landasan pengeluaran dan penerimaan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Anggaran yang telah disahkan diharapkan dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah.

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peranan penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018:61). Penganggaran adalah suatu sistem yang penting di hampir semua organisasi dan ditujukan untuk memahami cara kerja organisasi. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode penganggaran yang bersangkutan. Definisi dari belanja menurut PP Nomor 58 Tahun 2015

pasal 20 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun (Ruhmaini, Abdullah, & Darwanis 2019).

Namun kenyataannya, anggaran pemerintah pusat dan daerah mengalami permasalahan yang sama setiap tahunnya, yaitu tingkat penyerapan anggaran yang rendah atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hanif (2017) mengatakan pola penyerapan anggaran pemerintah daerah yang menunjukkan pola "*year end rush*" atau "santai di awal, kebut di akhir" sudah menjadi fenomena sistemik yang terjadi hampir setiap tahun. Pola penyerapan anggaran yang seperti ini kurang baik dilihat dari sisi perencanaan maupun manajemen kas. Proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu dan lebih merata.

Sampai saat ini, pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk kedalam kategori mengalami keminiman penyerapan APBD. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki fakta integritas yang kemudian ditandatangani oleh kepala SKPD, bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat memiliki serapan anggaran yang rendah apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Ruhmaini et al., 2019).

Dalam PP No.58 Tahun 2005 belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok,

jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sementara klasifikasi belanja menurut PP 71 Tahun 2010, belanja dibedakan berdasarkan jenis belanja, berdasarkan fungsi dan berdasarkan organisasi. Berdasarkan jenis belanja, belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/tak terduga dan belanja transfer. Sedangkan berdasarkan organisasi, belanja terdiri dari belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Berdasarkan fungsi belanja diklasifikasikan menjadi belanja untuk pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial (Ruhmaini et al., 2019).

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dari permasalahan penyerapan anggaran. Seperti juga yang terjadi pada performa realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi daerah-daerah di Indonesia pada tahun 2020 yang masih tercatat terdapat beberapa Pemerintah kabupaten yang tidak mampu mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti juga yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Data Kinerja Realisasi Keuangan APBD 2016-2019 Provinsi Sulawesi Barat (%)

Pemerintah Kabupaten	2016	2017	2018	2019
Majene	89,54	93,58	97,65	88,66
Mamasa	94,76	90,98	96,81	97,85
Mamuju	88,87	86,98	95,87	95,18
Mamuju Tengah	88,79	88,71	86,94	92,41
Pasangkayu	93,17	93,64	91,09	93,81
Polewali mandar	91,79	97,75	96,70	95,26

Sumber: Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab mengapa daya serap anggaran di pemerintah daerah jarang mencapai seratus persen. Pertama, besaran anggaran (*budget size*) dimana besaran anggaran menunjukkan seberapa besar beban dan tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah/SKPD. Semakin besar anggaran pemerintah daerah/SKPD, maka semakin banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan hal ini berdampak pada semakin besarnya nilai anggaran yang kemungkinan tidak terserap.

Besaran anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah banyaknya belanja dan besarnya beban yang ditanggung oleh SKPD, sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat (Ruhmaini et al., 2019). Kedua yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah komitmen organisasi. Pegawai yang berkomitmen terhadap pencapaian tujuan akan mendukung sepenuhnya nilai dan target yang ingin diperoleh oleh organisasi

(Kennedy et al., 2020). Selain besaran anggaran, dan besaran organisasi, ketergantungan fiskal juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran (Hanif, 2017).

Oleh karena hal tersebut, maka besaran anggaran, besaran organisasi dan ketergantungan fiskal perlu mendapatkan perhatian agar dapat meningkatkan daya serap anggaran. Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti berupaya untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Besaran Anggaran, Besaran Organisasi dan Ketergantungan Fiskal Terhadap Daya Serap Anggaran di Kabupaten-Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Serapan anggaran seluruh kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Barat selama periode tahun 2016 - tahun 2019 tidak pernah mencapai target. Oleh karena itu beberapa pertanyaan penelitian daaat diemukakan sebagai berikut:

1. Apakah besaran anggaran berpengaruh terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah besaran organisasi berpengaruh terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat?
3. Apakah ketergantungan fiskal berpengaruh terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Dan pertanyaan penelitian yang telah diemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh besaran anggaran terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh besaran organisasi terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketergantungan fiskal terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritik

1. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk dipergunakan pembaca serta menjadi bahan masukan yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal mengembangkan penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.
2. Penelitian ini dinantikan akan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang kurangnya dapat dipergunakan untuk sumbangsih pada dunia pemerintahan.
3. Akan dapat menambah teori atau konsep yang menjadi tumpuan dalam proses perkembangan manajemen keuangan sebagai salah satu cabang ilmu.

1.4.2. Kegunaan Praktik

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat menjadi ulasan bagi kabupaten-kabupaten di daerah Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan besaran anggaran, besaran organisasi dan daya serap anggaran.
2. Besar harapan penelitian ini dapat disetujui sebagai bahan informasi serta dapat menjadi rekomendasi atas pemecahan masalah yang dapat dikaitkan dengan daya serap anggaran di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Lebih lanjut hasil dari penelitian ini direkomendasikan menjadi sumber acuan untuk menata program menyelesaikan pada sebuah persoalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Manajemen Keuangan

2.1.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan fungsi manajemen yang kegiatannya adalah melakukan pengelolaan pada pengaturan keuangan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia pada organisasi. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian pada kegiatan keuangan. Adapun pengertian manajemen keuangan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Sutrisno (2017) manajemen keuangan adalah sebagai semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Menurut Fahmi (2015) manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan.

Sedangkan menurut Kamaludin (2011) manajemen keuangan adalah upaya untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan serta mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana untuk mencapai sasaran bagi pemegang saham.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli di atas, manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan dalam menggabungkan ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan serta mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana untuk mencapai sasaran bagi pemegang saham.

2.1.1.2. Fungsi Manajemen Keuangan

Sutrisno (2017) menjelaskan bahwa fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, fungsi dari manajemen keuangan terdiri dari:

1. Keputusan investasi keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:
 - a) Manajer keuangan menetapkan berapa aset secara keseluruhan (*total assets*) yang diperlukan dalam perusahaan.

- b) Dari aset yang diperlukan ditetapkan komposisi dari aset-aset tersebut yaitu berapa jumlah aktiva lancar (*current assets*) dan berapa jumlah aktiva tetap (*fixed assets*).
 - c) Untuk mencapai pemanfaatan aset secara optimal, maka aset-aset yang tidak ekonomis lagi perlu dikurangi, dihilangkan atau diganti dengan aset yang baru.
2. Keputusan pendanaan Keputusan pendanaan sering juga disebut sebagai kebijakan struktur modal. Dimana pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal, antara lain:
- a. Keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri.
 - b. Penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimal. Oleh karena itu, perlu ditetapkan apakah perusahaan menggunakan sumber modal ekstern yang berasal dari hutang dengan menerbitkan obligasi, atau menggunakan modal

sendiri dengan menerbitkan saham baru sehingga beban biaya modal yang ditanggung perusahaan minimal. Kekeliruan dalam pengambilan keputusan pendanaan ini akan berakibat biaya yang ditanggung tidak minimal.

3. Keputusan dividen Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan:
 - a) Besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk *cash dividend*,
 - b) Stabilitas dividen yang dibagikan,
 - c) dividen saham,
 - d) Pemecahan saham,
 - e) Penarikan kembali saham yang beredar, hal ini semua dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran pada pemegang saham.

Berdasarkan tiga keputusan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi manajemen keuangan sangat berkaitan satu sama lain dan dengan fungsi tersebut manajemen keuangan dapat membantu perusahaan dalam mengelola pendapat perusahaan. sedangkan fungsi manajemen keuangan menurut Mulyanti (2017) adalah:

1. Perencanaan Keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan akan dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya.

2. Penganggaran Keuangan yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses mengelola penerimaan dan pengeluaran.
3. Pengelolaan Keuangan yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
4. Pencarian Keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
5. Penyimpanan Keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.
6. Pengendalian Keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.
7. Pemeriksaan Keuangan yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

2.1.1.3. Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sebagai aktivitas memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset secara efisien membutuhkan beberapa tujuan atau sasaran. Untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai atau belum, maka dibutuhkan beberapa standar dalam mengukur efisiensi keputusan perusahaan. Sebagai tujuan normatif manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan di bidang keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Menurut Vahlia et al., (2019) adapun tujuan normatif dalam manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. Sedang menurut Sutrisno (2017) tujuan utama manajemen keuangan yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik. Dari semua pendapat tersebut tujuan manajemen keuangan intinya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, dengan kedua tujuan tersebut jelas manajer keuangan dituntut untuk mencapai dengan berbagai strategi yang baik.

2.1.1.4. Manajemen Keuangan Negara

Definisi keuangan negara seiring dengan disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi keuangan negara yang saat ini digunakan harus mengacu kepada peraturan perundangan tersebut (Waruwu, 2019). Menurut pasal 1 ayat 1 UU tersebut keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1. Pengelolaan moneter.
2. Pengelolaan fiskal.

3. Pengelolaan Kekayaan negara Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk pengeluaran Negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Jenis Anggaran pada keuangan negara terdiri dari:

1. Anggaran operasional: Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah seperti belanja rutin.
2. Anggaran modal/investasi: Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman.

Fungsi Anggaran keuangan negara terdiri dari:

1. Fungsi perencanaan Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam satuan unit dan uang.
2. Fungsi pelaksanaan Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerja, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba). jadi anggaran penting untuk mengkoordinasikan atau menyelaraskan setiap bagian kegiatan, seperti bagian pemasaran, bagian umum, bagian produksi dan bagian keuangan

3. Fungsi pengawasan Anggaran merupakan alat pengawasan (*controlling*), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara; membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu.

2.1.2. Besaran Anggaran

2.1.2.1. Pengertian Besaran Anggaran

Anggaran mempunyai peranan penting dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Anggaran tidak hanya penting bagi sektor swasta, tetapi juga penting bagi sektor publik. Jika anggaran sektor swasta cenderung tertutup untuk publik, memiliki tujuan untuk mendapatkan profit dan memiliki pertanggungjawaban kepada pemegang saham atau kreditor, maka anggaran sektor publik bersifat terbuka untuk publik, memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat (*non profit*) dan memiliki pertanggungjawaban kepada publik (Mardiasmo, 2018). Anggaran organisasi pemerintahan berbeda dengan anggaran perusahaan adalah penganggaran pada pemerintah dilakukan untuk menganggarkan belanja atau pengeluaran pemerintah sedangkan penganggaran pada perusahaan dilakukan untuk menganggarkan laba.

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu

dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran (Mardiasmo, 2018:78). Menurut Arikunto (2017) anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Menurut Ruhmaini et al., (2017) besaran anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah banyaknya belanja dan besarnya beban yang ditanggung oleh SKPD, sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Susanto & Halim, 2018). APBD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Siklus penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum (KUA) APBD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD kepada DPRD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang

telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan penyusunan anggaran bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

2.1.2.2. Fungsi Anggaran

Hanif (2017) menjelaskan, berdasarkan fungsinya, APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam PP No. 58/2005 Pasal 1 Ayat 7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, anggaran menjadi pedoman pelaksanaan aktivitas pemerintah daerah selama satu tahun, mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

Anggaran memiliki peran yang cukup vital dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk menggerakkan pembangunan sosial, ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Laju pembangunan suatu

daerah dapat dilihat dari efektifitas manajemen keuangan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas (Huseno, 2017). Sebaliknya, pengelolaan dan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas mencerminkan perencanaan daerah yang relatif lemah dan dapat menyebabkan pembangunan suatu daerah menjadi terhambat.

Fungsi anggaran menurut Waruwu (2019) yaitu:

1. Sebagai pedoman pengelolaan negara, anggaran menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan negara dalam satu periode tertentu. Adanya anggaran tersebut pemerintah dapat mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan.
2. Sebagai alat prioritas, jumlah pendapatan sangat terbatas sementara jumlah belanja terus meningkat. Untuk itu pemerintah harus membuat skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dari belanja negara tersebut dengan mendahulukan belanja sangat diperlukan dan mengurangi atau bahkan menghapuskan anggaran belanja yang tidak perlu, dengan kata lain para pengguna anggaran diharuskan berhemat dan efisien dalam hal belanja negara.
3. Sebagai alat negoisasi politik, adanya sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah merupakan sarana negoisasi politik dengan parlemen yang terdiri dari berbagai partai politik dengan tujuan yang berbeda.

2.1.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Besaran Anggaran

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik (*political tool*) sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu (Mardiasmo, 2018).

Faktor politik dalam hal ini adalah proses penetapan kebijakan tentang besaran anggaran dipengaruhi oleh berbagai kepentingan elemen politik (Abdullah, Darma, & Basri 2015). Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.

2.1.3. Besaran Organisasi

2.1.3.1. Pengertian Besaran Organisasi

Besaran organisasi didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan pegawai. Pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hanya dengan ukuran dan kualitasnya. Organisasi adalah proses terstruktur di mana orang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang berdasarkan bentuknya organisasi umumnya adalah berbentuk piramida, walaupun tak dipungkiri ada bentuk organisasi lainnya. Pada puncak piramida tersebut terdapat pengambilan keputusan, kekuasaan dan sumber informasi. Melalui tindakan pendelegasian wewenang dan penugasan lapisan

berikutnya, manajer tingkat lebih rendah mengupayakan agar segala sesuatu berlangsung sebagaimana mestinya (Wulandari & Rejeki 2017).

Begitu pula halnya dengan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan berbagai peraturan dan perundangan. Dalam mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi adalah hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurut Suryanto (2014) struktur organisasi merupakan peta formal yang menunjukkan pembagian dan pengelompokan tugas serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Semakin kompleks struktur organisasi semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga para pimpinan dapat memastikan bahwa setiap unit dapat bekerja dengan baik.

2.1.3.2. Faktor yang Mempengaruhi Besaran Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah tingkat kabupaten berdasarkan PP No. 8 Tahun 2000 dibentuk atas pertimbangan lima hal, yaitu (Wulandari & Rejeki 2017):

1. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah;
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
3. Kemampuan keuangan daerah;
4. Ketersediaan sumber daya aparatur;
5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga. Berdasarkan peraturan ini pula, organisasi perangkat

daerah kabupaten terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Kemudian berdasarkan pada PP No. 8 Tahun 2003 menyebutkan kriteria khusus dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, rasio belanja aparatur dalam APBD, jumlah kecamatan, dan jumlah desa. Jika dalam peraturan sebelumnya jumlah perangkat daerah tidak dibatasi maka PP No. 8 Tahun 2003 menyebutkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah tingkat kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah paling banyak 14 dinas, Lembaga Teknis Daerah yang diperkenankan paling banyak 8 lemtekda, Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP).

2.1.4. Ketergantungan Fiskal

2.1.4.1. Pengertian Ketergantungan Fiskal

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Zeatifani et al., 2018). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah yang diwakili oleh kementerian keuangan. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun

2003 tentang keuangan negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai suatu rencana operasi keuangan pemerintah antara lain:

1. Peningkatan penerimaan karena perubahan tarif pajak berpengaruh pada ekonomi;
2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh pada stimulasi pada perekonomian melalui dampaknya terhadap sisi pengeluaran agregat;
3. Politik anggaran (surplus, berimbang, atau defisit) sebagai respon atas suatu kondisi;
4. Strategi pembiayaan dan pengelolaan hutang

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah, kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mengelola anggaran dalam mempengaruhi perekonomian serta memaksimalkan kesejahteraan dan stabilitas dalam perekonomian.

Ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten, sedangkan pemerintah daerah kota/kabupaten merupakan titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Indriani, 2019).

2.1.4.2. Desentralisasi Fiskal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis: (1) Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar berbagai peraturan; (2) Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan tanggung jawab dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan; (3) Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya 16 desentralisasi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*)

diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendanaan (*revenue assignment*).

2.1.4.3. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Implementasi otonomi daerah yang direncanakan akan diberlakukan pada tahun 2001 yang mengacu pada dua UU, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah. UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (UU-PKPD) merupakan UU yang mengatur perimbangan keuangan atau desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pembagian fungsi dan 17 wewenang penyelenggaraan pemerintah diantara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten atau kota dalam UU tentang pemerintah daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2018): (1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*); (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (3) Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional; (4) Tata kelola, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran; (5) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 mekanisme transfer kebijakan dari pusat ke daerah telah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) (Mardiasmo, 2018). Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, struktur komponen belanja dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi dan ekonomi (jenis belanja). Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga) dan belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal).

2.1.5. Daya Serap Anggaran

2.1.5.1. Pengertian Daya Serap Anggaran

Kesejahteraan rakyat yang meningkat dapat dicerminkan dari jumlah keterserapan anggaran pemerintah. Hanif (2017) mendefinisikan penyerapan anggaran satuan kerja sebagai "proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari otonomi daerah, yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran (budget variances). Semakin kecil varian anggaran (budget variances), maka semakin besar serapan anggaran dan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan. Menurut Ruhmaini et al., (2019) serapan belanja adalah jumlah anggaran belanja yang telah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai (Handayani & Muda, 2017).

Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran, yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi bermakna bahwa sisa anggaran (yang merupakan implikasi dari terjadinya varian anggaran) tidak banyak pada akhir tahun. Artinya, daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran (Abdullah et al., 2015).

2.1.5.2. Fungsi Daya Serap Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 pasal 4 ayat 2, yaitu evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran (Rerung et al., 2017).

2.1.5.3. Faktor yang Mempengaruhi Daya Serap Anggaran

Menurut Alumbida et al., (2019) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan anggaran memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, sehingga semakin baik perencanaan maka akan semakin baik penyerapan anggaran. Oleh karena itu, menurut Ramadhani et al., (2019) apabila konsep perencanaan tidak matang akan berdampak pada program kerja yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi lambat.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Menurut Rahmawati et al., (2020) anggaran merupakan tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun

anggaran baru dimulai. Walaupun perencanaan sudah disusun dengan baik tetapi jika dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala atau hambatan maka akan mengakibatkan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal ataupun tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga sangat mungkin realisasi anggaran menjadi lambat dan tidak tepat waktu.

Menurut Rahmawati et al., (2020) regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya. Regulasi digunakan oleh organisasi publik untuk mewujudkan kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Namun dikarenakan banyaknya aturan yang berubah secara cepat sementara waktu yang tersedia tidak terlalu banyak, sehingga dalam pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam pengimplementasiannya dari suatu kegiatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

2.2. Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh besaran anggaran, besaran organisasi dan ketergantungan fiskal terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Imam Hanif dan Suparno (2017). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Aceh (18 kabupaten dan 5 kota). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh (DKA). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah setiap kabupaten dan kota di Aceh selama 3 tahun pengamatan (2013-2015). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier berganda Hasil penelitian ini baik secara parsial maupun simultan mendukung hipotesis tersebut Ketepatan waktu persetujuan anggaran dan tekanan fiskal mempengaruhi penyerapan anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Aceh.
2. Tun Huseno (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Senjangan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, organisasi komitmen, dan ketidakpastian lingkungan baik secara parsial maupun simultan terhadap kelonggaran anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sampel penelitian ini sebanyak 105 responden dan diambil secara purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang

dikumpulkan melalui survei teknik dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing pejabat eselon III dan IV di unit provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil hipotesis parsial menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap senjangan anggaran, komitmen organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Tetapi ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh pada senjangan anggaran. Analisis dari sekaligus menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan Ketidakpastian lingkungan berdampak pada senjangan anggaran.

3. Yuke K. Merentek, Vecky A.J. Masinambow dan Een N. Walewangko (2019). Pengaruh Besaran Anggaran Program Pengawasan Terhadap Kinerja Inspektorat Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh besaran anggaran program pengawasan terhadap kinerja Inspektorat Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian assosiatif dengan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH tidak berpengaruh terhadap Kinerja Inspektorat Kota Manado, Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Inspektorat Kota Manado dan Secara simultan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Inspektorat Kota Manado.

4. Ruhmaini, Syukriy Abdullah, dan Zuraida (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Belanja Langsung Skpk di Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Besaran Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya, dan Perubahan Anggaran terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan 121 sampel SKPK selama 4 tahun anggaran. Data yang digunakan bersumber dari Qanun APBK dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa Besaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, sementara Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran berpengaruh signifikan dengan arah negatif.
5. Yenni Triana (2016). Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Lalu, Perubahan Anggaran Tahun Sebelumnya Dan Besaran Anggaran (Budget Size) Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Skpa Pada Pemerintah Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh

Sisa anggaran tahun lalu, Perubahan anggaran tahun sebelumnya dan Besaran anggaran (*budget size*) terhadap Perubahan anggaran belanja SKPA pada Pemerintah Aceh. Responden penelitian ini sebanyak 47 SKPA di Pemerintah Aceh dengan melakukan pengamatan terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan dokumen APBA dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan sisa anggaran, perubahan anggaran tahun sebelumnya dan besaran anggaran SKPA. Metode yang digunakan adalah sensus, yaitu seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu dalam pengumpulan data. Data diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Pengujian dan analisis data dilakukan dengan menggunakan formulasi regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa anggaran tahun lalu, Perubahan anggaran tahun sebelumnya dan Besaran anggaran (*budget size*) secara bersama-sama dan sendiri-sendiri berpengaruh terhadap Perubahan anggaran belanja SKPA pada Pemerintah Aceh. Kata kunci: Sisa anggaran tahun lalu, Perubahan anggaran tahun sebelumnya, Besaran anggaran (*budget size*), Perubahan anggaran belanja SKPA, Pemerintah Aceh.

6. Rika Septi Rahmawati dan Jouzar Farouq Ishak (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa untuk penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kota Cimahi. Dan untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya penyerapan tersebut anggaran dan bagaimana solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini bersifat kuantitatif penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner akan disebarakan kepada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Cimahi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan manusia sumber daya tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Cimahi. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, manusiawi sumber daya, dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Cimahi.

7. Elypaz Donald Rerung, Herman Karamoy dan Winston Pontoh (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan e-procurement terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan regresi berganda. Sampel penelitian adalah 63 orang yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran dan pengelola pengadaan barang/jasa, diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, kelompok kerja pengadaan dan bendahara pengeluaran pada 14 SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, dan penerapan e-procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan kepada pengambil kebijakan pada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka peningkatan penyerapan anggaran.

8. Ahmad Rifai, Biana Adha Inapty, dan Rr. Sri Pancawati M (2016). Analisis Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Daya

Serap Anggaran (Studi Empiris Pada Skpd Pemprov NTB). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perencanaan, regulasi, koordinasi, pelaksanaan, desentralisasi dan sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terlambatnya daya serap anggaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan aparatur yang terlibat dalam proses penatausahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel perencanaan, regulasi, koordinasi, pelaksanaan, desentralisasi dan sumber daya manusia pada daya serap anggaran. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perencanaan, regulasi, pelaksanaan, desentralisasi, koordinasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh pada keterlambatan daya serap anggaran. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas cakupan sampel dan memperbaiki indikator variabel yang digunakan terutama untuk perencanaan terkait permasalahan penganggaran.

9. Darwis Lannai dan Asbi Amin (2020). *Factors Affect Budget Absorption In Government Institutions Of South Sulawesi*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh regulasi keuangan, penyerapan anggaran, kompetensi aparatur, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi terhadap

penyerapan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat memberikan masukan bagi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi dalam memaksimalkan penyerapan anggaran. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan sampel menggunakan teknik Judgment Sampling dengan memilih 2 Pegawai Negeri Sipil Negara yang diwakili oleh Kepala Kantor Organisasi Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di masing-masing Dinas Provinsi. Sulawesi Selatan sehingga diperoleh total 54 sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa regulasi keuangan, penyerapan anggaran, kompetensi, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mengimplikasikan bahwa kepentingan masyarakat selalu menjadi pedoman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam setiap tindakan dan kegiatan sebagai prinsip dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penganggaran.

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Sebelumnya

No	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variable penelitian	Alat analisis	Hasil Penelitian
Hubungan X_1 ke Y					
1	Ruhmaini, Syukriy Abdullah, dan Zuraida (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Belanja Langsung Skpk di Kabupaten Aceh Tengah	X_1 = Besaran Anggaran X_1 = Sisa Anggaran Y = Serapan Anggaran	Regresi linier berganda	Hasil analisis menunjukkan bahwa Besaran Anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran, sementara Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran berpengaruh signifikan dengan arah negatif.
2	Yenni Triana (2016)	Pengaruh sisa Anggaran Tahun Lalu, Perubahan Anggaran Tahun Sebelumnya Dan Besaran Anggaran (Budget Size) Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Skpa	X_1 = sisa Anggaran Tahun Lalu X_1 = Besaran Anggaran Y = Serapan Anggaran	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa anggaran tahun lalu, Perubahan anggaran tahun sebelumnya dan

No	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variable penelitian	Alat analisis	Hasil Penelitian
		Pada Pemerintah Aceh			Besaran anggaran (budget size) secara bersama-sama dan sendiri-sendiri berpengaruh terhadap terhadap Perubahan anggaran belanja SKPA pada Pemerintah Aceh.
3	Esha Falahi Bastaria, Indarto, dan Aprih Santoso (2019)	Telisik Determinan Penyerapan Anggaran	X_1 = Perencanaan Anggaran X_2 = Pelaksanaan Anggaran X_3 = Kompetensi SDM Y = Serapan Anggaran	Regresi linier berganda	Temuan empiris telah membuktikan bahwa Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dan Monitoring tidak

No	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variable penelitian	Alat analisis	Hasil Penelitian
					memoderasi secara signifikan Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran.
Hubungan X₂ Ke Y					
4	Deiby Isilda Alumbida, David P.E. Saerang, Ventje Ilat (2016)	Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	X ₁ = Perencanaan X ₂ = Kapasitas SDM X ₃ = Kompetensi SDM Y = Serapan Anggaran	Regresi linier berganda	Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Talaud Kabupaten dengan tujuan menganalisis pengaruh perencanaan, kapasitas manusia sumber daya dan komitmen organisasi terhadap tingkat

No	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variable penelitian	Alat analisis	Hasil Penelitian
					penyerapan anggaran daerah secara ersamaan atau parsial. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan perencanaan, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif untuk penyerapan anggaran.
Hubungan X₃ ke Y					
5	Imam Hanif dan Suparno (2017)	Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	$X_1 =$ Waktu penerapan $X_2 =$ Fiskal Distress $Y =$ Serapan Anggaran	Regresi linier berganda	Hasil penelitian ini baik secara parsial maupun simultan mendukung hipotesis tersebut Ketepatan waktu persetujuan anggaran dan

No	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variable penelitian	Alat analisis	Hasil Penelitian
					tekanan fiskal mempengaruhi penyerapan anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Aceh.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

3.1.1. Hubungan Besaran Anggaran terhadap Daya Serap Anggaran

Penelitian mengenai pengaruh besaran anggaran terhadap daya serap anggaran dilakukan oleh Ruhmaini et al., (2017) yang menemukan bahwa besaran anggaran berpengaruh positif terhadap daya serap anggaran yang menunjukkan bahwa semakin tinggi besaran anggaran maka tinggi pula penyerapan anggaran. SKPD di pemerintahan (*agency*) memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan alokasi anggaran pengeluaran. Alokasi anggaran yang besar akan memudahkan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena memberi keleluasaan untuk membuat kebijakan dalam membiayai program dan kegiatannya

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Triana (2016) menyatakan bahwa besaran anggaran berpengaruh terhadap perubahan anggaran, yang menyatakan bahwa semakin besar anggaran semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan anggaran yang akan mencerminkan tanggung jawab dan beban SKPK yang semakin besar, sehingga tingkat keakuratan penganggaran juga akan semakin rendah, hal ini dapat menimbulkan terjadinya keterlambatan dalam merealisasikan anggaran belanja.

3.1.2. Hubungan Besaran Organisasi terhadap Daya Serap Anggaran

Penelitian mengenai pengaruh besaran organisasi dilakukan oleh Herryanto (2017) menemukan bahwa minimnya SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah Jakarta. Hal senada ditemukan dalam penelitian Arif (2018) bahwa minimnya SDM merupakan faktor penyebab minimnya penyerapan APBD T.A 2011 di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hal ini disebabkan oleh penempatan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang disertai masih minimnya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan serta tingginya frekuensi mutasi pegawai sehingga pegawai bersangkutan masih harus menyesuaikan diri dengan tugas yang baru. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan adanya hubungan searah antara sumber daya manusia dengan penyerapan anggaran belanja daerah, yang berarti bahwa dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran belanja daerah.

3.1.3. Hubungan Ketergantungan Fiskal terhadap Daya Serap Anggaran

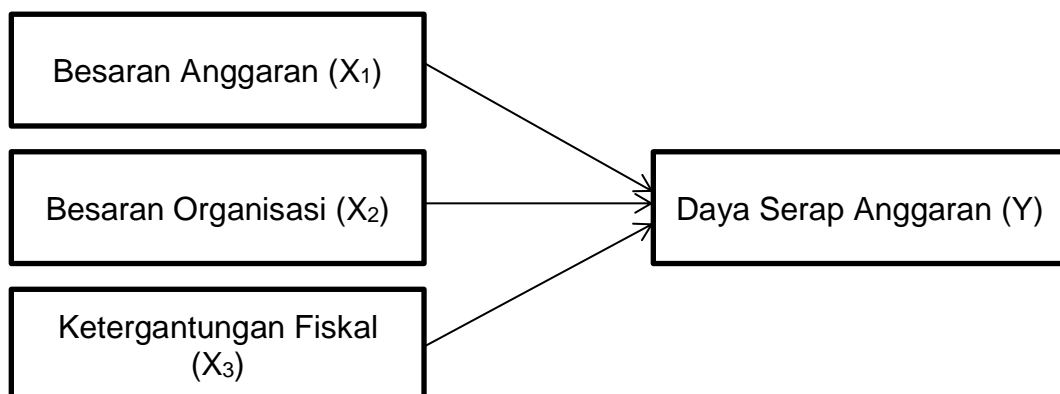
Penelitian mengenai pengaruh ketergantungan fiskal dengan daya serap anggaran dilakukan oleh Hanif (2017) yang menemukan bahwa fiskal berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya, semakin tinggi tingkat fiskal yang

dialami suatu daerah maka semakin rendah nilai penyerapan anggaran daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mengalami fiscal stress tidak memiliki keleluasaan dalam menyesuaikan anggarannya.

Tekanan fiskal yang tinggi mencerminkan kebutuhan belanja daerah yang besar namun tidak mampu diimbangi dengan kemampuan memperoleh pendapatan daerah yang seimbang. Hal ini berarti pemerintah daerah dengan kondisi ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut memiliki fleksibilitas yang rendah dalam menyesuaikan anggarannya sehingga tidak mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran daerah tersebut.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang disesuaikan dengan teori, konsep jalur, dan hasil penelitian terdahulu maka skematis dapat dibuat kerangka pemikiran yang dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual



3.2. Hipotesis

Hanif (2017) mendefinisikan penyerapan anggaran satuan kerja sebagai “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik (*political tool*) sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan pada PP No. 8 Tahun 2003 menyebutkan kriteria khusus dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, rasio belanja aparatur dalam APBD, jumlah kecamatan, dan jumlah desa. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah yang diwakili oleh kementerian keuangan. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis yaitu bahwa:

1. Besaran anggaran berpengaruh positif terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.

2. Besaran organisasi berpengaruh positif terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.
3. Ketergantungan fiskal berpengaruh negatif terhadap daya serap anggaran di Kabupaten-kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.